

# **ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RUSUN BUMN BINA LINGKUNGAN PEDULI BAGI KELOMPOK SASARAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DENGAN SKEMA RELOKASI DI KEMAYORAN – JAKARTA**

Rachmana Ajie Tambunan<sup>1</sup>, Deddy S. Bratakusumah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Esa Unggul

Jl. Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk Jakarta 11510

ajie\_tambunan@yahoo.com

## **Abstract**

*“Rusun BUMN BL Peduli” program is one of the government programs in the effort to provide decent and affordable housing in the area Kemayoran Jakarta. The program mission is to organize the slums by relocating residents to a shelter house owned flats, the target group is the Low-Income Communities. The study design using Method mix, and in this study the identification of the process of policy implementation “Rusun BUMN BL Peduli”, analytical approach used is a model inter-variable theory of George Edward III variable communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The analysis used in this research is multiple linear regression analysis, to measure how much variables George Edward III. Hypothesis testing is done while the t test for independent variables simultaneously test used F test. These results indicate there is simultaneously a positive and powerful influence between the variables of communication, human resources, attitudes and bureaucratic structure of policy implementation “Rusun BUMN BL Peduli”. The results could give an idea of the policy “Rusun BUMN BL Peduli” as a whole, so that the communication factor, resources and bureaucratic structures of concern to be improved, as well as the need to put in the form of supporting policies, among others.*

**Keywords :** *implementation of policy, communication, reources*

## **Abstrak**

Program Rusun BUMN BL Peduli merupakan salah satu program pemerintah dalam upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di wilayah Kemayoran Jakarta. Program misinya yaitu menata hunian kumuh dengan merelokasi warga ke hunian Rusunami, dengan kelompok sasarannya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Desain Penelitian menggunakan mix Method, serta dalam penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap proses implementasi kebijakan Rusun BUMN BL Peduli, pendekatan analisis yang digunakan yaitu model antar variabel teori George Edward III yaitu variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel George Edward III. Uji hipotesis dilakukan dengan uji t sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh positif dan kuat antara variabel komunikasi, sumberdaya manusia, sikap dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan Rusun BUMN BL Peduli. Hasil penelitian ini dapat memberi gambaran mengenai kebijakan Rusun BUMN BL Peduli secara keseluruhan, sehingga faktor komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi menjadi perhatian untuk ditingkatkan, serta perlu dituangkan dalam bentuk kebijakan pendukung.

**Kata kunci :** *implementasi kebijakan, komunikasi, sumber daya*

## **Pendahuluan**

Dalam 20 tahun terakhir ini, pembangunan perumahan di Indonesia cukup pesat perkembangannya. Namun demikian hasil pembangunan dan pertumbuhan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan

masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kaitannya dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata merupakan bagian dari cita-cita bangsa Indonesia didalam mewujudkan pemba-

ngunan nasional yang tercermin didalam UUD 45, dimana pada pasal 28 H diatur mengenai setiap warga Negara berhak untuk bertempat tinggal.

Dalam hal pelaksanaan penyediaan perumahan di Indonesia pemerintah telah membuat kebijakan yang diatur dalam UU nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Undang-undang tersebut merupakan landasan bagi para developer untuk mengedepankan penyediaan perumahan bagi kelompok sasaran berpenghasilan rendah.

Penanganan permasalahan permukiman yang dihadapi kota besar di Indonesia semakin kompleks, hal tersebut disebabkan tingginya tingkat kelahiran dan migrasi penduduk yang terbentur dengan lahan di perkotaan semakin terbatas dan nilai lahan yang semakin meningkat serta mayoritas penduduk dari tingkat ekonomi rendah.

Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah, merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab tidak terkendalinya perkembangan permukiman pusat kota, karena pembangunan ekonomi pada hakikatnya untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Permasalahan umum yang dijumpai dalam penyediaan perumahan di Indonesia adalah makin besarnya gap penyediaan dengan permintaan. Jumlah permintaan rumah melesat seiring dengan pesatnya pertambahan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Secara keseluruhan, kebutuhan rumah baru akibat penambahan 'rumah tangga baru' sekitar 820.000 per tahun. Sedangkan jumlah kekurangan rumah (*backlog*) berdasarkan data BPS tahun 2013 diperkirakan 15 juta unit rumah.

Dengan melihat permasalahan penyediaan permukiman yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia disebabkan harga rumah yang tidak terjangkau bagi kelompok sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah, hal itu menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat mengisi lahan-lahan kosong yang bukan milik mereka dan tidak sesuai dengan peruntukannya untuk membangun rumah. Hal tersebut menyebabkan kekumuhan kota meningkat, perkembangan kota kedaerah pinggiran menjadi tidak terkendali, dan penyediaan infrastruktur

menjadi tidak efisien.

Pembangunan perumahan yang tidak terpadu dan terintegrasi dengan infrastruktur kota akan menyebabkan kekumuhan kota, lalu pertumbuhan dan perkembangan kota yang tidak terkendali dapat menciptakan permukiman kumuh pusat kota dan daerah pinggiran atau yang disebut juga *Urban Sparawl*.

Di dalam perjalanan kebijakan dan program penanganan perumahan dan permukiman di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan di tingkat program dan proyek, namun bukan di tingkat kebijakan dan strategi penanganan.

Di Indonesia pada era tahun 90an mengangkat masalah penyediaan perumahan dan permukiman menjadi salah satu isu kebijakan nasional khususnya terkait dengan penanganan permukiman kumuh, dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 1990 tentang peremajaan permukiman kumuh yang berada di atas tanah Negara. Secara garis besar kebijakan tersebut bertujuan mempercepat peningkatan mutu kehidupan masyarakat terutama bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal dikawasan pemukiman kumuh yang berada diatas tanah Negara. Dalam proses implementasinya pemerintah khususnya melalui kebijakan presiden mengutus para instansi-instansi pemerintah baik pusat dan daerah, BUMN, BUMD, Yayasan, Swasta dan masyarakat luas agar berkordinasi dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut.

Lokasi program tersebut berada di lokasi Bandar Kemayoran yang merupakan lahan bekas kawasan bandara yang sudah tidak dioperasikan, namun diluar lokasi *run way*nya masih terdapat bangunan rumah yang tidak tertata secara teratur. Untuk status lahan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 31 Tahun 1985 sebagai kekayaan negara. Tanah eks Bandar Udara Kemayoran itu berstatus HPL yang dikuasai oleh Sekretariat Negara cq Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

Pelaksanaan program yaitu dengan merelokasi warga yang tinggal dipermukiman padat dan kumuh ke lokasi hunian rusunami dan rusunawa, pelaksana program tersebut melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta menugaskan Perum Perumnas selaku BUMN di bidang perumahan atau *public*

*housing corporation* dan Badan Pengelola Komplek Kemayoran yang sekarang berubah nama menjadi Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran sebagai pemegang HPL. Pelaksanaan program tersebut berhenti dan hasil dari program tersebut yaitu telah berdirinya beberapa tower Rusunami dan Rusunawa.

Setelah program dilokasi tersebut terhenti, dan menyadari permasalahan akan permukiman di Indonesia, kemudian pada era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). Selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM Nasional 2004-2009 yang sarannya di antaranya: pembangunan rusunawa 60.000 unit; pembangunan rusunami (peranserta swasta) 25. 000 unit; dan penataan kawasan kumuh perkotaan melalui pembangunan rumah susun sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam mengatasi makin besarnya backlog, juga telah diterbitkan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rusun di Kawasan Perkotaan untuk mempercepat pembangunan rumah susun baik rusunami dan rusunawa khususnya di kota-kota besar.

Program penyediaan perumahan di Indonesia dimulai kembali menjadi isu program nasional pada tahun 2007 yang disebut dengan program pembangunan 1000 tower, pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk merangsang peran sektor pemerintah, swasta dan masyarakat luas agar dapat berkordinasi dan terlibat didalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi atau sebagai pelaku pelaksana dalam program tersebut.

Pendekatan pemerintah melalui program 1000 tower yaitu mencoba kembali memaksimalkan peran BUMN properti Perum Perumnas yang merupakan *Public Service Corporation* khusus penyedia perumahan bagi kepentingan masyarakat menengah bawah. Pelaksanaan pembangunan Rumah Susun kembali difokuskan di lokasi Kemayoran, pelaksanaan program berada dibawah koordinasi langsung Wakil Presiden dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Perum Perumnas selaku *Public Service Corporation* di bidang perumahan ditugaskan oleh Kementerian Perumahan Rakyat melalui surat penugasan untuk membangun Rusunami di lokasi Kemayoran. Pada tahun 2008 rencananya Perumnas akan membangun 5 tower rusunami di blok C Kemayoran, namun tahap awal pembangunan hanya terbangun 2 tower yang selesai pada tahun 2010, sedangkan sisa 3 tower belum dapat terlaksana disebabkan meningkatnya harga konstruksi karena faktor inflasi.

Dengan kenaikan harga konstruksi yang disebabkan faktor inflasi tersebut serta pergantian rezim pemerintahan maka secara nasional pelaksanaan program pembangunan rusun 1000 tower berjalan stagnan, tidak hanya program rusunami yang dilaksanakan oleh Perumnas, namun paradeveloper swasta cenderung memilih untuk mengembangkan apartemen karena dianggap *profitable*.

Setelah program rusun 1000 tower di lokasi Kemayoran terhenti, maka dilakukan pendekatan oleh pemerintah melalui Kementerian BUMN dengan kebijakan program BUMN Bina Lingkungan berdasarkan Permen BUMN nomor 05 tahun 2007, program ini merupakan program CSR BUMN yang melingkupi 8 sektor, salah satunya adalah sektor Rumah Layak Huni, yang merupakan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat tidak mampu atau disebut dengan program rusun BUMN BL peduli.

Secara operasional, program Bina Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri BUMN nomor 08 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Negara BUMN nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, kemudian Kementerian BUMN mengeluarkan SK menteri BUMN Nomor 235 2012 tentang BUMN Peduli 2012, selanjutnya Kementerian BUMN menunjuk Perum Perumnas sesuai surat nomor 617 tahun 2013 selaku BUMN operator untuk pelaksana program Rusun BUMN Bina Lingkungan Peduli.

Perum Perumnas berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 15 Tahun 2004 merupakan perusahaan milik Negara yang bergerak di bidang perumahan dan permu-

kiman dan berperan sebagai *Public Service Corporation*. Program-program yang dilaksanakan oleh Perum Perumnas merupakan program perpanjangan tangan dari pemerintah Pusat khususnya Kementerian BUMN selaku kementerian kordinator dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai kementerian teknis.

Melalui tugas yang diberikan oleh Kementerian BUMN, maka Program yang diemban oleh Perumnas yaitu menyediakan Rusunami bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Konsep pelaksanaan programnya yaitu dikenal dengan istilah “bedol RT atau bedol RW” atau dengan kata lain merelokasi warga dari permukiman padat dan kumuh ibu kota ke hunian Rusunami, yang bertujuan untuk menata kawasan tersebut menjadi kawasan hunian terpadu dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana pendukungnya.

Pelaksanaan program rusun BUMN Bina Lingkungan peduli telah dimulai sejak tahun 2011 dan lokasinya di Kemayoran yang merupakan bagian dari pelaksanaan program pembangunan rusun 1000 tower yang sempat terhenti. Langkah awalnya Perum Perumnas membangun Rusunami di blok C Kemayoran sebanyak 2 tower lalu merelokasi warga Kemayoran yang tinggal di permukiman padat dan kumuh, target penghuninya adalah kelompok sasaran masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan pada tahap penghunian tentunya akan melibatkan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku mandatory untuk wilayah tersebut.

Lokasi sasaran program yaitu khusus bagi warga yang berdomisili di kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, yang terdiri dari 6 RW. Persyaratan calon penerima program yaitu kelompok masyarakat Berpenghasilan rendah, sebagaimana telah diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 20 tahun 2014 terkait dengan persyaratan dan mekanisme fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Peraturan tersebut digunakan sebagai batasan untuk menentukan kelompok sasaran yang berhak mendapat atau membeli rusunami tersebut.

Dengan melihat gambaran diatas maka pelaksanaan program rusun BUMN Bina Lingkungan Peduli merupakan bagian dari

kebijakan publik. Implementasi kebijakan penyelenggaraan Program Rusun BUMN BL Peduli merupakan bagian dari program Kementerian BUMN selaku pembuat kebijakan dan menugaskan Perum Perumnas selaku pelaksana kebijakan.

Pada awal pelaksanaannya hal yang menjadi faktor kunci adalah kordinasi dan komunikasi, dimana faktor tersebut berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikordinasikan dan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi instansi-instansi yang terlibat karena pelaksanaan program tersebut akan melibatkan lintas instansi atau birokrasi, serta mengingat pelaksanaan program tersebut hanya diatur berdasarkan Peraturan Menteri.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari manajemen kebijakan publik secara umum. Implementasi kebijakan ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplemen tasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini akan meneliti secara mendalam mengenai Implementasi kebijakan, dengan judul: “Analisis Implementasi Kebijakan Program Rusun BUMN Bina Lingkungan Peduli Bagi Kelompok Sasaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dengan Skema Relokasi di Kemayoran – Jakarta”. Pemilihan topik ini didasarkan pada pengalaman dan data awal yang didapat di lapangan sehubungan dengan kendala yang dirasakan selama implementasi kebijakan berlangsung. Disamping itu yang menjadi pertimbangan peneliti adalah bahwa penelitian ini masih berada dalam kajian ilmu administrasi publik.

Permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 1) Apakah implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli sesuai maksud dan tujuan program ? 2) Bagaimana Implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli ? 3) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan Rusun BUMN BL Peduli ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah :1) Meneliti dan mengidentifikasi implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli. 2) Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran.

Program Bina Lingkungan sesuai Permen BUMN nomor 08 Tahun 2013 adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN dengan kata lain program CSR BUMN. Program Rusun BUMN BL Peduli dilaksanakan oleh Perum Perumnas masuk kedalam sektor sarana dan parasarana serta Rumah Layak huni.

Program Misinya terkait dengan pelaksanaan kebijakan Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran yaitu : 1) Pembangunan Rumah Susun Milik untuk memindahkan warga di kawasan permukiman padat dan kumuh (bedol RT/ RW). 2) Penataan kembali kawasan kumuh di Kelurahan Kebon Kosong Kemayoran menjadi komplek rumah susun terpadu. 3) Memberikan kesempatan kepada warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran dan sekitarnya.

Definisi Rumah Susun Sederhana sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2011 adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sedangkan definisi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berdasarkan Permenpera nomor 05 tahun 2014 adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.

Sedangkan relokasi Secara harfiah menurut kamus besar Indonesia (1996) diartikan sebagai pemindahan tempat atau pemindahan dari suatu lokasi ke lokasi lain. Jika dikaitkan dalam konteks perumahan dan permukiman relokasi dapat diartikan pemindahan suatu lokasi permukiman ke lokasi permukiman yang baru.

Dalam menyusun suatu kebijakan, urutan-urutan perlu dilalui, dari mulai perumusan masalah, dan diakhiri dengan penghentian kebijakan. Lester dan Stewart (2000:179) menyusun tahapan dalam enam

langkah dengan uraian masing-masing yaitu 1) *Agenda Setting*, 2) *Policy Formulation*, 3) *Policy Implementation*, 4) *Policy Evaluation*, 5) *Policy Change*, 6) *Policy Termination*.

Implementasi kebijakan menurut Prof. H. Tachjan menyimpulkan bahwa "Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan". (2006: 25).

Konsep atau model implementasi kebijakan telah dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik yaitu berdasarkan teori model Van meter dan Van horn, model Grindle, model Mazmanian dan Sabatier, model G. Edward III, model Cheema dan Rondinelli serta model Soren C. Winter.

Pendekatan teori pada penelitian ini akan merujuk kepada model implementasi kebijakan G. Edwards III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

Faktor komunikasi, Implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Faktor sumber daya, Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yaitu implementator, dan sumberdaya finansial.

Faktor Sikap, sikap adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki sikap yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif.

Faktor Struktur Birokrasi, yaitu merupakan struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

### **Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan selama satu bulan di Kantor Perumnas. Sedangkan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran atau *concurrent triangulation designs* di mana peneliti secara bersamaan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, menggabungkan dalam analisis data kuantitatif dan kualitatif dan kemudian menafsirkan hasilnya bersama-sama untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dari fenomena yang menarik. Menurut Bryman (1988).

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Perum Perumnas sebanyak 30 orang yang terlibat dengan pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli Kemayoran. Bahwa jika analisis yang digunakan adalah teknik korelasi maka sampel yang diambil minimal tiga puluh. Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 1) Observasi, 2) Wawancara mendalam (*indepth interview*) 3) Pengisian kuesioner.

Dalam penelitian ini ada lima jenis variabel, yaitu: (1) empat variabel bebas: komunikasi (X1), sumber daya (X2), sikap (X3) dan struktur birokrasi (X4) dan satu variabel terikat: implementasi kebijakan (Y). Jadi, dalam penelitian ini terdapat lima instrumen pengumpulan data, yang diperoleh melalui angket dalam bentuk skala Likert.

Selanjutnya angket yang telah disebar ke responden dilakukan uji kualitas data yaitu berdasarkan 1) Uji Validitas, merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan (Sugiyono, 2004:137) dan 2) Uji Reliabilitas, menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Umar, 2010: 63).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 1) Analisis distribusi frekuensi dan 2) Analisis regresi linear berganda. Sedangkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang linear antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen X1, X2, X3, X4, maka perlu dilakukan hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis yang digunakan yaitu menggunakan uji signifikansi dengan dilakukan uji t, sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan uji F.

### **Hasil dan Pembahasan**

Seluruh item pertanyaan yang dijawab responden pada kuesioner memiliki koefisien korelasi (rhitung) lebih besar dari rtabel = 0,301, artinya menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan yang tercantum pada kuesioner valid.

Reliabilitas instrumen dihitung dengan menggunakan rumus Alpha. Uji coba instrumen menghasilkan reliabilitas Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Sikap (X3), Struktur Birokrasi (X4), dan Implementasi Kebijakan (Y) secara berturut-turut adalah:  $r = 0,844$ ;  $r = 0,609$ ;  $r = 0,731$ ;  $r = 0,756$  dan  $r = 0,839$ . Koefisien korelasi r (tabel) pada  $N = 30$  adalah 0,6 (taraf signifikansi 1%), artinya instrumen penelitian diatas adalah reliabel.

Hasil persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$\hat{Y} = 0,675 + 0,059X_1 + 0,171X_2 + 0,403X_3 + 0,219X_4.$$

Nilai konstanta sebesar 0,675 berarti variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y) adalah sebesar 0,675 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X1), sumberdaya (X2), sikap (X3), dan struktur birokrasi (X4) adalah konstan.

Nilai koefisien variabel komunikasi (X1) sebesar 0,059 berarti variabel komunikasi (X1) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel komunikasi (X1) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Jika terjadi kenaikan variabel komunikasi (X1) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program

Rusun BUMN BL Peduli (Y) sebesar 0,059 persen, dengan asumsi bahwa variabel sumber daya (X<sub>2</sub>), sikap (X<sub>3</sub>), dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel sumber daya (X<sub>2</sub>) sebesar 0,171; berarti variabel sumberdaya (X<sub>2</sub>) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel sumberdaya (X<sub>2</sub>) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Jika terjadi kenaikan variabel sumberdaya (X<sub>2</sub>) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y) sebesar 0,171persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X<sub>1</sub>), sikap (X<sub>3</sub>), dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel sikap (X<sub>3</sub>) sebesar 0,403 berarti variabel sikap (X<sub>3</sub>) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel sikap (X<sub>3</sub>) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Jika terjadi kenaikan variabel sikap (X<sub>3</sub>) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y) sebesar 0,403 persen, dengan asumsi bahwa variabel komunikasi (X<sub>1</sub>), sumberdaya (X<sub>2</sub>), dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Nilai koefisien variabel struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) sebesar 0,219 berarti variabel struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) mempunyai hubungan yang positif dengan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Hal ini menunjukkan bahwa naiknya variabel struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Jika terjadi kenaikan variabel struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) sebesar satu persen, maka akan menaikkan variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y) sebesar 0,219 persen, dengan asumsi bahwa variabel

komunikasi (X<sub>1</sub>), sumberdaya (X<sub>2</sub>), dan sikap (X<sub>3</sub>) tetap pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa variabel sikap (X<sub>3</sub>) dalam korelasinya memberikan pengaruh signifikan dengan taraf yang kuat terhadap variabel implemementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y). Sebab, jika variabel sikap (X<sub>3</sub>) mengalami kenaikan sebesar satu persen, korelasi terhadap kenaikan implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli sebesar 0,403 persen baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan Hasil Analisis Korelasi Ganda (R) diperoleh angka R sebesar 0,663, artinya menunjukkan terjadi hubungan yang kuat antara komunikasi (X<sub>1</sub>), sumberdaya (X<sub>2</sub>), sikap (X<sub>3</sub>), dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) terhadap implemementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y).

Sedangkan hasil uji nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) yaitu sebesar 41,1%, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli Kemayoran (Y) tidak sepenuhnya ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor komunikasi (X<sub>1</sub>), sumberdaya (X<sub>2</sub>), sikap (X<sub>3</sub>) dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>). Artinya terdapat sisa angka sebesar 68,9% yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hal tersebut diindikasikan antara lain berdasarkan teori model implementasi kebijakan yang sudah dibahas pada bab sebelumnya seperti; model Van Meter dan Van Horn, model Grindle, model Mazmanian dan Sabatier, model Cheema dan Rondinelli serta model C. Winter.

Berdasarkan hasil uji F, dapat diketahui bahwa nilai F hitung > nilai F tabel yaitu 4,361 > 2,759; atau H<sub>0</sub> diterima. Artinya bahwa variabel komunikasi (X<sub>1</sub>), sumberdaya (X<sub>2</sub>), sikap (X<sub>3</sub>), dan struktur birokrasi (X<sub>4</sub>) secara bersama-sama atau simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli (Y).

Berdasarkan hasil Uji t, Variabel Komunikasi (X<sub>1</sub>) menunjukan Nilai t hitung < nilai t tabel yaitu 0,301 < 2,045, maka variabel komunikasi (X<sub>1</sub>) secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli (Y). Hal ini disebabkan penyebaran informasi publik secara tidak langsung, tidak dilakukan secara kontinyu dan rutin oleh pegawai Perumnas yang terlibat dalam pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli. Hal tersebut diindikasikan karena Perum Perumnas selaku pelaksana kebijakan belum mendapat rekomendasi dari Pemerintah pusat mengenai besaran subsidi harga Rusun yang akan diberikan kepada masyarakat penerima program, sehingga pegawai Perumnas yang terlibat masih khawatir dalam hal penyampaian informasi publik secara tidak langsung kepada masyarakat dan hanya menyampaikan informasi publiknya dalam forum formal saja.

Variabel SumberDaya (X2) menunjukkan Nilai t hitung < nilai t tabel yaitu  $0,726 < 2,045$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya (X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli (Y), Hal ini disebabkan tingkat keterlibatan pegawai Perumnas dalam pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli khususnya pada proses konsultasi publik dan sosialisasi masih sangat minim atau jarang. Serta hal lain juga disebabkan belum optimalnya peran dan bantuan dari pihak pemerintah atau Kementerian terkait dalam hal pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran.

Variabel Sikap (X3) menunjukkan Nilai t hitung > nilai t tabel yaitu  $2,125 > 2,045$ , maka variabel sikap (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli (Y).

Variabel Struktur Birokrasi (X4) menunjukkan Nilai t hitung < nilai t tabel yaitu  $1,016 < 2,045$ , maka variabel struktur birokrasi (X4) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli (Y), Hal ini disebabkan belum dibentuknya tim khusus relokasi – alokasi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, Perum Perumnas dan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran, terkait hal pelaksanaan program

Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Program Rusun BUMN BL Peduli merupakan salah satu program Kementerian BUMN untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN, program ini dilaksanakan oleh Perum Perumnas yang dilaksanakan berdasarkan empat proses tahapan yaitu dimulai pada pelaksanaan pembangunan Rusunami yang sudah dimulai sejak tahun 2012, tahap kedua proses sosialisasi yang terdiri dari kegiatan persiapan, konsultasi publik, pendataan dan sosialisasi, tahap ketiga proses relokasi yang terdiri dari kesepakatan dengan warga dan verifikasi warga dan tahap keempat yaitu penghunian yang terdiri dari proses *screening* dan *approval*, namun dalam pelaksanaannya program tersebut masih pada tahap proses sosialisasi.

Implementasi Kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli telah berjalancukupbaik dan telah sesuai dengan maksud dan tujuan program, namun dalam proses implementasinya dapat teridentifikasi beberapa hal yaitu : (2.1) Belum optimalnya dukungan kebijakan dari instansi terkait secara khusus dalam hal pelaksanaan program rusun BUMN BL Peduli. (2.2) Kebijakan Rusun BUMN BL Peduli tidak komprehensif, karena dalam pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan antar lintas sektor instansi. (2.3) Kurangnya *Political will* pemerintah terkait pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli Kemayoran, hal tersebut diindikasikan terjadi perbedaan paradigma antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal program penanganan permasalahan perumahan dan permukiman.

Variabel sikap secara parsial berpengaruh signifikan dalam implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli.

Variabel komunikasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam implementasi kebijakan Rusun BUMN BL Peduli, hal tersebut disebabkan penyebaran informasi publik secara tidak langsung yang dilakukan oleh pegawai Perumnas tidak dilakukan secara

kontinyu dan rutin pada saat pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli.

Variabel sumberdaya secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli, hal tersebut disebabkan kurangnya ketersediaan fasilitas pendukung dan minimnya tingkat keterlibatan pegawai Perumnas dalam rangka pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli, serta hal lain juga disebabkan belum optimalnya peran dan bantuan dari pihak pemerintah atau Kementerian terkait dalam hal pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran.

Variabel struktur birokrasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan dalam implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL Peduli, hal tersebut disebabkan belum dibentuknya tim khusus relokasi-alokasi pelaksanaan program Rusun BUMN BL Peduli yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, Perum Perumnas dan Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.

Secara simultan atau serentak berdasarkan faktor implementasi kebijakan model G. Edward III, menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi berpengaruh positif dan kuat dalam implementasi kebijakan Rusun BUMN BL Peduli di Kemayoran.

Berdasarkan hasil analisis nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel-variabel implementasi kebijakan program Rusun BUMN BL peduli tidak hanya dipengaruhi oleh variabel Komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur Birokrasi, namun dapat diindikasikan dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini, yaitu variabel lingkungan kebijakan yang merupakan bagian dari faktor eksternal.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.

Abidin, Said Zaenal. (2012). *Kebijakan Publik*: edisi kedua. Salemba Humanika, Jakarta.

Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabet, Bandung.

Anderson. J. E. (1995). *Public Policy Making*. Nelson, London.

Brata kusumah, Deddy. (2012). *Metoda dan Teknik Analisis Kebijakan Publik*: bahan kuliah. Universitas Esa Unggul, Jakarta.

Bryman, A. (1988). *Quantity and Quality Social Research*. Unwin Hyman, London.

Bungin, Burhan. (2005). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Darwin, Muhadjir. (1998). *Implementasi Kebijakan*. Modul Kursus TMPP MAP-UGM, Yogyakarta.

Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua, Cetakan Kelima)*. Gadjja Mada University, Yogyakarta.

Dye, Thomas R. (1987). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, New Jersey .

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc, Washington DC.

Edwards dan Sharkansky dalam Wahab, Solichin Abdul Wahab. (1990). *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta, Jakarta.

Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. (1998). *Policy Analysis For The Real Word*. Oxford University Press, USA.

Islamy, M. I. (2001), *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. BumiAksara, , Jakarta.

Jones, C. O. (1996). *An Introduction to the Study of Public Policy*. Terjemahan: Ricy Istamto. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Mazmanian, Daniel H. , dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public Policy*. Harper Collins, New York.
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdyakarya, Bandung.
- Mulyana, Dedy. (2001). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Rosda, Bandung.
- Mustopadidjaja, A. R. (2000). *Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan*. LAN, Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Riant. (2008). *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Peters, B. Guy and Jon Pierre. (2003). *Handbook of Public Administration*. SAGE Publications. London.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Prasetyo, B. , Jannah, L. M. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teoridan Aplikasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Qudratullah M. F. (2012). *Analisis Regresi Terapan: Teori, Contoh Kasus, dan Terapan dengan SPSS*. CV Andi Offset, Yogyakarta.
- Rakhmat. (2009). *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Penerbit Pustaka Arief, Jakarta.
- Riduwan. (2012). *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*. Alfabeta, Bandung.
- Silalahi, Ulbert. (2006). *Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan dimensi*. Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Subarsono, A. G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, Wiratna. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tachjan, Dr. H, M. Si. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Budaya Unggulan di Industri Menuju World Class*. MenaraTunggal, Jakarta.
- Tangkilisan, Drs Hessel Nogi S. (2003). *Implementasi kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta.
- Tilaar, H. A. R dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar, Husein. (2010). *Desain Penelitian Manajemen Strategik: Cara Mudah Meneliti Masalah-masalah Manajemen Strategik untuk Skripsi, Tesis, dan Praktik Bisnis*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra. (2011). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Wibawa, Samodra. et. al. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Bayumedia Publishing, Malang.

Winarno, Budi. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Presindo, Yogyakarta.

Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publlik Teori dan Proses*, Edisi Revisi. Media Pressindo, Yogyakarta.

Yuwono, Teguh dan Badjuri Abdulkahar. (2002). *Kebijakan Publik konsep dan strategi*. UNDIP, Semarang.